23

KEBIJAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN SAGU DAN NIPAH

Dudung darusman
(Lektor Ekonomi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB)

Makalah Pembahasan pada Seminar Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah, Jakarta 14 Mei 1992

Setelah membaca makalah ***Kebijaksanaan Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah***, yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa butir pembahasan, terutama yang menyangkut program pengembangannya. Untuk itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa hal yang perlu dipahami bersama sehubungan dengan kebijaksanaan pengusahaan sagu dan nipah di Indonesia, sebagai berikut.

1. ***Pertama***, adalah tentang pemahaman bersama tentang kedudukan hutan dan kehutanan dalam kemajuan dan perjuangan Bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Kehutanan yang dimaksud adalah pengelolaan hutan sebagai produsen berbagai bentuk hasil hutan yang selanjutnya merupakan bahan baku bagi berbagai industri. Industri mana sangat besar peranannya dalam perekonomian, baik nasional maupun internasional. Di antara hasil-hasil hutan tersebut adalah tepung sagu dan nira nipah.

   Apabila kita perhatikan, setiap kegiatan industri selalu memerlukan unsur-unsur pokok : bahan baku, teknologi dan modal, tenaga kerja, dan keterampilan manajemen/kewirausahaan. Di antara unsur-unsur pokok tersebut, maka hanya bahan baku-lah yang dimiliki sebagai keunggulan Bangsa Indonesia dalam percaturan persaingan internasional, yang sering kita sebut sebagai *globalisasi ekonomi* itu.

   Kalaupun pada unsur-unsur pokok lainnyapun kita semakin maju, namun harus disadari bahwa masih jauh untuk dapat dikatakan unggul. Sedangkan pada bahan baku, Bangsa Indonesia sudah jelas-jelas unggul, dan keunggulan ini harus dipelihara dan dipertahankan terus agar Bangsa Indonesia memiliki kekuatan memimpin secara politik dan ekonomi dimasa yang akan datang.

   Kita dapat melihat betapa kuatnya *leadership* OPEC dalam percaturan energi dunia, dan karena perannya maka Bangsa Indoensia dapat memetik harga dan penerimaan yang lebih baik dari ekspor bahan baku : minyak buminya.
   Atas dasar kepentingan tersebut, maka pengembangan pengusahaan hutan sagu dan nipah tidak hanya perlu dilihat sebagai usaha ekonomi finansial saja, tetapi harus disadari bersama sebagai usaha strategis mempertahankan keunggulan

Bangsa Indonesia dalam hal bahan baku. Bahkan kita harus waspada terhadap kemungkinan upaya-upaya negara maju untuk melemahkan dan mengambil keuntungan sepihak terhadap keunggulan bahan baku tersebut dengan upaya/tindakan monopsonistik. Bukankah dalam hal teknologi dan modal negara-negara maju tersebut telah terbukti selama ini melakukan berbagai bentuk tindakan monopolistik ?

Kebijaksanaan dasar yang harus kita pegang adalah mem-*back up* kekuatan penyediaan bahan baku agar tetap unggul, yakni tetap banyak dan relatif murah, sehingga tetap menguasai pasar.

2. ***Kedua***, adalah tentang pentingnya upaya kita untuk terus berusaha mengembangkan hasil-hasil hutan non-kayu, di samping hasil hutan kayu, agar kekuatan ekonomi nasional semakin meningkat, yakni dengan meningkatnya *economic diversity* yang menyebabkan semakin tahan terhadap ketidakpastian pasar, serta dengan meluasnya lapangan usaha baru yang menyebabkan meningkatnya efisiensi investasi nasional. Di samping itu pengembangan hasil hutan non-kayu, dengan asumsi investasi bersifat terbatas dan kompetitif, akan dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya hutan sebagai penghasil kayu.

3. ***Ketiga***, adalah tentang perlunya ketenangan dan kehati-hatian dalam pengembangan pengusahaan hutan sagu dan nipah di Indonesia. Hutan sagu di Indonesia mecakup luas 1,1 juta ha, sementara hutan nipah diperkirakan 6 juta ha. Sumberdaya alam hutan sagu dan nipah tersebut hanya mencakup ± 11 % saja dari seluruh hutan produksi di Indonesia. Khusus hutan sagu hanya ± 2 % saja. Oleh karena itu dalam rencana pengembangan pengusahaan hutan sagu dan nipah tidaklah perlu ada keterdesakan oleh keadaan atau keterburu-buruan seperti halnya yang kita alami pada awal-awal pengusahaan HPH terdahulu, yang sangat terdesak oleh kebutuhan dana cair (dalam bentuk devisa) bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan.

   Kiranya sangat tepat apabila sekarang kita tidak perlu menetapkan target pencapaian luas pengusahaan hutan sagu dan nipah, tetapi target kita adalah pengembangan pengusahaan sagu dan nipah yang efisien dan memberikan dampak *multiplier* sebesar mungkin terhadap perekonomian nasional, terutama perekonomian wilayah setempat.

   Kita cukup lega napas untuk memanfaatkan sumberdaya alam sagu dan nipah kita, untuk memenuhi berbagai kepentingan pembangunan selanjutnya (Pembangunan Jangka Panjang Tahap II) yang semakin mengutamakan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha, perluasan lapangan kerja, pemerataan pembangunan antar wilayah, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain, di samping kepentingan pertumbuhan ekonomi yang relatif telah berhasil kita capai pada waktu yang lalu.

   Sementara itu kita menghadapi pasar sagu, khususnya internasional, yang semakin cerah dimasa-masa yang akan datang. Kita tidak terburu-buru, bahkan kalau kita penuh ketenangan dan kehati-hatian, maka kita dapat menjadi pemasok bahan baku sagu yang utama di dunia.

Lebih lanjut apabila kita bekerjasama dengan Malaysia dan Papua New Guinea dalam menghadapi pasar internasional, maka kita akan memetik manfaat yang lebih besar lagi, sebagaimana halnya yang kita peroleh dari kartel OPEC, seperti yang telah disebutkan di atas.

Atas dasar ketiga pemikiran atau pemahaman seperti tersebut di atas, selanjutnya akan dikemukakan 5 butir-butir bahasan sebagai berikut :

1. Pelaku pengusahaan sagu dan nipah.

Perlu diusulkan 2 pilihan pelaku pengusahaan hutan sagu dan nipah, yakni :

a. Pengusaha swasta yang bersifat : (1) lokal, khususnya tingkat propinsi, dan (2) kelas menengah dan bawah. Sehingga dapat berkembang apa yang disebut *Small Holder Forestry.*

Keunggulan dari pilihan ini adalah :

(1) lebih mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan pemerataan kesempatan berusaha
(2) memberi *multiflier effect* yang lebih besar terhadap perekonomian wilayah dan perekonomian sektoral.
(3) dapat didukung oleh tingkat investasi yang relatif rendah
(4) mengangkat *image* politis kehutanan yang tidak hanya berpartner dengan pengusaha-pengusaha besar level nasional saja.

Di lain pihak, terdapat kelemahan dalam hal efisiensinya yang pada umumnya relatif rendah.

b. BUMN Kehutanan, yakni dengan membentuk BUMN-BUMN yang baru.

Keunggulan dari pilihan ini adalah :

(1) BUMN kehutanan terbukti tangguh dan berdedikasi tinggi terhadap keprofesian kehutanan
(2) penerimaan negara secara langsung per satuan sumberdaya alam yang relatif paling tinggi
(3) mudah disejalankan dengan kebijaksanaan Pemerintah, apabila terjadi perubahan/ penyempurnaan kebijaksanaan perusahaan di kemudian hari. Perlu diingat bahwa luas 1,1 juta ha hutan sagu dan ± 6 juta ha hutan nipah adalah bukan jumlah sumberdaya alam yang terlalu besar untuk mem-*buffer* gerak maju dan kecerdikan pengusaha besar seperti telah ditunjukkan oleh para pengusaha HPH selama ini.

Kalau mau disebutkan adanya kelemahan dari BUMN, adalah *performonce* efisiensi produksinya yang biasanya bukan yang paling efisien.

Kiranya tidak perlu diusulkan pengusaha besar swasta berlevel nasional untuk ikut menjadi pelaku pengusahaan hutan sagu dan nipah, mengingat pertimbangan-pertimbagan sebagai berikut : (1) relatif kurang dapat meratakan pembangunan dan kesempatan berusaha, (2) kebocoran ekonomi antar sektor (ke luar kehutanan) dan ke luar negeri yang relatif besar dan jauh lebih mudah kemungkinannya, serta sangat sulit pengendaliannya (3) para pengusahaa besar berlevel nasional sudah cukup banyak menikmati kesempatan berusaha dengan telah menggarap ± 90 % dari sumberdaya alam hutan produksi di Indonesia. Di lain pihak, keunggulan pengusaha besar swasta berlevel nasional adalah dalam hal efisiensi produksinya yang pada umumnya tinggi.

2. ***Waktu pengusahaan hutan sagu dan nipah.***

Seperti pengalaman pada pengusahaan HPH selama ini, waktu pengusahaan adalah sangat berpengaruh terhadap kesungguhan pengusaha untuk mempertahankan dan memelihara asset hutannya setelah kegiatan pemungutan hasilnya. Karena pada dasarnya setiap upaya pengusaha untuk mempertahankan dan memelihara asset perusahaannya harus disertai kepastian akan memperoleh hasil jerih payahnya, maka waktu pengusahaan hutan sagu dan nipah minimal harus dua kali dari daurnya.

Apabila diketahui daur sagu rata-rata 10 tahun maka waktu pengusahaan hutan sagu harus sekurang-kurangnya 20 tahun. Dari sudut pengelolaan hutan sagu, tentu saja waktu pengusahaan lebih dari 20 tahun akan berdampak lebih baik lagi.

3. ***Strategi masuk pasar internasional.***

Seperti telah dikemukakan dalam butir pemahaman dasar di atas, strategi pengusahaan sagu dan nipah dalam lingkup pasar dunia harus atas dasar strategi pengusahaan bahan baku yang harus mampu mengimbangi penguasaan teknologi dan modal oleh negara-negara maju dalam percaturan kegiatan industri di dunia.

Oleh karena itu Indonesia harus memulai langkahnya dengan mengajak negara-negara penghasil sagu dan nipah untuk bersatu dalam menghadapi dan memasuki pasar internasional. Kebetulan negara-negara tersebut adalah tetangga kita sendiri, yakni Malaysia dan Papua New Guinea. Apabila kita tidak berusaha bersatu, maka struktur pasar akan bersifat *oligopolistik*, yang cenderung saling melemahkan antara negara produsen sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, target atau rencana porduksi Indonesia perlu ditetapkan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan produksi negara lain, sehingga tidak sampai mengacaukan pasar internasional. Untuk itu tidaklah berlebihan bila selalu dibuat kesepakatan rencana produksi di antara negara-negara produsen, seperti halnya yang dilakukan dalam organisasi OPEC seperti disebutkan di muka.

4. ***Pengetahuan pengelolaan yang ada.***

Alangkah idealnya apabila kita telah memiliki pengetahuan pengelolaan yang cukup pada saat memulai pengusahaan hutan sagu dan nipah. Namun demikian, tampaknya pengetahuan yang ada baik di dalam negeri maupun di negara tetangga sudah cukup memadai untuk berani memulai pengusahaannya.

Sungguhpun demikian, dalam 3 – 5 tahun mendatang kita harus dapat menyempurnakan pengetahuan yang ada tersebut, dengan menggali parameter-

parameter dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengusahaan dan kelestarian sumberdaya alam hutannya. Untuk itu perlu dilakukan *crash program* untuk menggali pengetahuan yang ada tersebut, termasuk *comparative study* ke negara tetangga yang telah lebih dahulu mengusahakannya.

Departemen Kehutanan perlu membentuk "kelompok kerja" yang terdiri dari ahli dan praktisi dari berbagai lembaga yang selama ini telah memperhatikan pengusahaan sagu dan nipah di Indonesia.

Kelompok kerja tersebut, hendaknya mendapat tugas untuk menghasilkan pedoman atau panduan yang dapat dipergunakan oleh para calon pengusaha hutan sagu dan nipah, serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah. Diantaranya dalam hal-hal sebagai berikut :

(1) Analisis investasi : selang luas optimum, struktur biaya dan pendapatan, peluang permodalan, dan sebagainya.
(2) Panduan untuk beberapa pilihan sistem silvikultur, mulai dari pemilihan jenis, persemaian, penanaman, pemeliharaan sampai masak tebang, dan teknik pemanenannya.
(3) Paket atau panduan untuk beberapa pilihan teknologi industri pengolahan, mulai dari penyediaan bahan dan peralatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan/perawatannya.
(4) Rekomendasi pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan pengusahaan.
(5) Rekomendasi aspek-aspek pengelolaan yang masih harus diteliti dan diuji-coba di lapangan, serta rekomendasi stasiun-stasiun penelitian dan uji coba yang diperlukan.
(6) Perlu dipikirkan dan dipersiapkan sejak awal dengan sematang-matangnya mengenai sistem monitoring, pengendalian dan pengawasannya. Bahkan mungkin kita harus menahan diri sebelum sistem tersebut dianggap siap.

5. *Prioritas wilayah pengembangan.*

Hutan sagu dan nipah di Indonesia secara alami menyebar di beberapa wilayah propinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Khusus dalam hal sagu perlu ditekankan bahwa prioritas pengembangan sebaiknya diberikan kepada propinsi-propinsi di Indonesia Bagian Timur (IBT), yang secara historis kultural terkait erat dengan persaguan, di samping untuk lebih mempercepat perkembangan ekonomi pada umumnya di wilayah IBT tersebut.

Demikianlah kiranya butir-butir pembahasan yang dapat disampaikan terhadap makalah utama ***"Kebijaksanaan Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah"*** yang ditulis oleh Bapak Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan. Semoga dapat bermanfaat.